

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Untuk menganalisis wacana gender dan seksualitas dalam komik ini, penulis akan menggunakan teori dan konsep yang tercakup dalam bidang sastra. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kuasa Wacana oleh Michel Foucault mengenai hubungan antara wacana, kekuasaan, pengetahuan, gender, dan seksualitas. Konsep tentang gender dan seksualitas juga akan dijelaskan pada bagian ini terkait dengan wacana yang menjadikan orang-orang yang tidak memenuhi atau berbeda dengan *stereotype* masyarakat tentang gender dan seksualitas akan terasingkan.

#### **2.1 Teori Kuasa Wacana dan Konsep Seksualitas Menurut Michel Foucault**

Paul Michel Foucault (1926-1984) adalah seorang filsuf, sejarawan, dan kritikus sastra yang berasal dari Prancis. Pemikiran-pemikirannya dalam *post-modernisme* dan *post-strukturalisme* memengaruhi banyak bidang ilmu pengetahuan seperti kedokteran, sastra, kriminologi, studi gender dan multikultural, serta lainnya. Pemikiran dan teorinya membahas tentang berbagai bidang, salah satunya terkait hubungan pengetahuan dengan kekuasaan yang keduanya menjadi alat kontrol sosial masyarakat atau yang disebut Teori Kuasa Wacana. Pemikiran-pemikirannya banyak mengkritik pemikir aliran modernitas yang di masanya sedang gencar diteliti. Tidak hanya itu, Foucault juga meneliti hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu atau terpinggirkan dan terabaikan.

##### **2.1.1 Teori Kuasa Wacana**

Melalui Teori Kuasa Wacana, Foucault mengkritik teori strukturalisme tentang adanya aturan universal yang berlaku pada semua kelompok masyarakat serta menguatkan pendapatnya tentang permasalahan “kekuasaan” dalam penggunaan bahasa. Bahasa yang selama ini dikatakan sebagai salah satu produk budaya, ternyata merupakan pembentuk kebudayaan itu sendiri. Lewat bahasa

suatu pihak yang dianggap memiliki kuasa bisa menyatakan sesuatu menjadi benar atau salah.

Pada analisis wacana, ada tiga asumsi yang menjadi fokus utama. Pertama, ilmu pengetahuan yang mengonstruksi subjek dan menjadi objek penelitian. Kedua, adanya individu yang kemudian mengubah dirinya menjadi subjek. Ketiga, ‘pembeda’ atau ‘pemisah’ untuk wacana normal dengan yang tidak normal (Lubis, 2014:74). Melalui ketiga asumsi tersebut, pengetahuan akan menjadi teknologi pendisiplinan yang melahirkan aturan, sehingga terlahirlah “individu yang patuh” pada aturan berdasar pengetahuan tersebut. Penulis melihat bahwa dalam konteks penelitian ini, wacana yang akan dianalisis akan berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk menjadi ‘pemisah’ wacana yang normal dengan yang tidak normal. Pemegang kuasa memiliki kemampuan untuk menentukan baik dan buruk, benar dan salah dalam suatu komunitas. Salah satu bentuk komunitas yang paling dekat dengan kita adalah masyarakat sosial sekitar kita, yang tentunya tidak luput dari hal ini. Hukum atau aturan bermasyarakat sering kali berupa hukum tidak tertulis atau yang biasa kita sebut dengan norma. Norma masyarakat terbentuk dari hasil kesepakatan bersama dan dipertahankan bersama. Ketika ada yang menyalahi aturan dalam masyarakat tersebut, orang tersebut akan menerima sanksi sebagai bentuk pembetulan oleh masyarakat. Karena itu dalam hal ini, masyarakat sendiri bisa dikatakan sebagai pemegang kuasa atas wacana yang ada dalam lingkungannya.

Kehidupan sosial merambah aspek identitas kita sebagai makhluk sosial. Identitas yang menjadi pembeda sekaligus penyaring apakah seseorang pantas berada dalam kelompok tersebut atau tidak. Bagian dari identitas suatu individu adalah jenis kelamin, gender, dan seksualitas. Ketiganya berkaitan erat dengan perkembangan budaya dan sejarah masyarakat sejak dahulu. Jenis kelamin dianggap sebagai faktor utama gender seseorang dan akan berkaitan langsung dengan seksualitasnya. Padahal kenyataannya, jenis kelamin sebagai bawaan biologis bukanlah penentu gender seseorang. Namun, pembangunan definisi gender yang dikonstruksi sejak dulu oleh masyarakat pun muncul dan memiliki kuasa untuk menentukan perbedaan jenis kelamin menjadi dua, yaitu laki-laki

yang “maskulin” dan perempuan yang “feminin”. Jenis kelamin dan gender sering dianggap sebagai hal yang sama sebagai akibat dari konstruksi sosial oleh masyarakat sebagai pemegang kuasa. Di sisi lain, seksualitas yang merupakan ciri, sifat, atau peranan seks yang dimiliki individu, menjadi salah satu aspek terkait wacana masyarakat mengenai jenis kelamin dan gender. Melalui konstruksi sosial wacana gender yang terdiri dari feminin dan maskulin, wacana seksualitas pun terbentuk di mana seseorang yang feminin akan berpasangan dengan yang maskulin. Terbentuknya wacana gender yang terdiri dari 2 jenis gender serta seksualitas yang memasangkan kedua gender tersebut kemudian disebut dengan Heteronormativity. Mengutip dari website *American Psychological Association* (APA) tentang pengertian *Heteronormativity*,

*...the assumption that heterosexuality is the standard for defining normal sexual behavior and that male-female differences and gender roles are the natural and immutable essentials in normal human relations.*

Heteronormativity merupakan asumsi dimana heteroseksualitas adalah standar kenormalan suatu hubungan seksual berdasarkan pembagian peran gender laki-laki dan perempuan yang dianggap natural dalam hubungan manusia.

Melalui *heteronormativity*, topik tentang seksualitas dan gender yang sebenarnya luas dan dalam, dengan mudahnya diarahkan dengan menggunakan kuasa wacana. Tanpa memperdalam pemahaman, masyarakat dengan kuasanya menentukan mana yang benar dan salah menurut mereka, karena itu Foucault dalam Lubis (2014:75) menjelaskan bahwa pada teorinya tentang bagaimana kuasa wacana, perhatiannya bukan bertolak pada “apa yang benar”, akan tetapi “bagaimana versi kebenaran itu menjadi diterima dan dominan”.

### **2.1.2 Konsep Seksualitas**

Seksualitas menurut Martono dalam Indah (2000:14) didefinisikan sebagai bentuk energi psikis atau kekuatan hidup yang mendorong suatu organisme untuk berbuat sesuatu yang sifatnya seksual, baik dengan tujuan reproduksi atau tidak. Seksualitas menjadi salah satu faktor yang membentuk identitas diri suatu individu sehingga seksualitas pun menjadi suatu kesatuan dengan budaya yang

ada pada masyarakat. Selama ini masyarakat luas terbiasa memahami bahwa seksualitas yang benar adalah heteroseksualitas, di mana laki-laki akan tertarik pada lawan jenisnya yaitu perempuan, dan begitu juga sebaliknya perempuan akan tertarik pada laki-laki yang dimana norma atas apa yang dianggap “normal” ini disebut *heteronormativity*. Seksualitas ditentukan oleh jenis kelamin dan gender tiap individu, di mana seseorang dengan seks perempuan akan diharapkan memiliki gender feminin dan heteroseksual, dan seseorang dengan seks laki-laki akan diharapkan bergender maskulin dan heteroseksual sehingga mereka bisa dinyatakan “benar” oleh lingkungannya. Padahal seks dan gender merupakan dua hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan begitu saja. Gender seseorang tidak hanya ditentukan oleh seksnya namun juga lingkungan, kebudayaan, etnis, dan faktor-faktor nonbiologis lainnya. Sehingga orang-orang yang tidak mengikuti konsep heteroseksualitas yang masyarakat percayai akan dicap “tidak benar”.

Seksualitas awalnya merupakan bahasan terbuka dan bahkan tidak banyak dipermasalahkan karena dianggap sebagai ranah pribadi yang tidak perlu dibahas secara publik Foucault dalam bukunya *The History of Sex* (1978:3) menjelaskan tentang bagaimana seksualitas dibahas pada awal abad ke-17.

*At the beginning of the seventeenth century a certain frankness was still common, it would seem. Sexual practices had little need of secrecy...*

Pada awal abad ke-17, kelihatannya kelugasan tertentu (terkait seksualitas) masih dianggap biasa. Praktik (hal-hal yang berkaitan dengan)seksualitas hanya sedikit ditutup-tutupi.

Foucault menjelaskan bahwa pada awal abad ke-17 terlihat bahwa kegamblangan terkait praktek seksual masih dibicarakan tanpa merahasiakannya. Namun ketika memasuki *Victorian Era*, seksualitas menjadi topik yang dianggap tabu untuk dibicarakan secara gamblang. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan masyarakat agar lebih produktif pada era tersebut.

Seiring berjalannya waktu, akibat dari opresi yang diterima saat membahas topik terkait seksualitas, pembahasan seksualitas menjadi tidak dalam dan pengendalian pembahasan tentang seksualitas inilah yang menjadi pegangan bagi para pemegang kuasa wacananya. Seksualitas yang awalnya tidak diperdebatkan dan bersifat bebas, kini dikendalikan karena *image*-nya sebagai topik pembicaraan

yang tidak senonoh. Seksualitas mulai diarahkan menuju norma heteroseksual seiring dengan menguatnya budaya gender biner. Meski begitu Foucault (1978: 105) mengatakan :

*Sexuality must not be thought of as a kind of natural given which power tries to hold in check, or as an obscure domain which knowledge tries gradually to uncover. It is the name that can be given to a historical construct...*

Seksualitas bukanlah pemberian alamiah yang diopresi oleh kekuatan, bukan juga sebagai suatu pembahasan misterius yang selalu digali oleh ilmu pengetahuan. Seksualitas adalah nama yang diberikan pada sesuatu yang dikonstruksi secara sosial.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Foucault mengutarakan bahwa seksualitas pun, bukan sesuatu yang secara natural didapatkan seseorang seperti bagaimana seseorang mendapat jenis kelaminnya. Seksualitas merupakan konstruksi sosial di mana kuasa wacana norma heteroseksual dinyatakan sebagai yang benar dan selain itu dianggap salah.

Pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa gender dan seksualitas merupakan produk budaya yang disematkan pada seseorang sebagai identitas diri yang harus diikuti dan dipertunjukkan performanya, didukung dengan jenis kelamin yang menjadi bahan dasar pembentukan wacana tersebut. Karena konstruksi budaya inilah, dalam komik *Seibetsu Mona Lisa No Kimi E* dapat dilihat bagaimana Hinase, Ritsu, dan Shiori dibingungkan oleh seksualitas mereka ketika mempertanyakan bagaimana ketertarikan mereka pada Hinase jika dia sudah memilih jenis kelaminnya, meski pada akhirnya tanpa memedulikan jenis kelamin, gender, dan seksualitas, seseorang akan tetap menjadi orang tersebut secara individu.

## 2.2 Konsep Gender Menurut Judith Butler

Gender menjadi hal yang melekat erat dalam kehidupan manusia mulai dari sejarah peradaban manusia yang selalu diikuti terlihatnya peran gender dalam masyarakat. Pada tiap arus sejarah selalu digambarkan tokoh laki-laki yang maskulin dan di sisi lain akan ada tokoh perempuan yang digambarkan feminin. Keduanya pun menjadi *stereotype* gender yang bahkan masih dominan terbawa

hingga zaman ini. Namun, adanya *stereotype* terhadap gender tertentu tidak lain merupakan hasil rekayasa kultur dan tradisi yang telah mengakar kuat dalam masyarakat (Rokhmansyah, 2016:1). Secara terminologis, gender mengacu pada harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender tidak berdiri sendiri ataupun hanya dipengaruhi dari jenis kelamin yang dimiliki seseorang, namun seperti yang dijelaskan Butler (1999:6) dalam *Gender Trouble*:

*... gender is not always constituted coherently or consistently in different historical contexts, and because gender intersects with racial, class, ethnic, sexual, and regional modalities of discursively constituted identities. As a result, it becomes impossible to separate out "gender" from the political and cultural intersections in which it is invariably produced and maintained.*

Gender tidak selalu dibentuk secara konsisten atau koheren dalam sejarah karena gender berkaitan dengan hal-hal seperti ras, kelas, etnis, seksualitas, dan modalitas regional yang membangun suatu identitas. Karena itu pula keberadaan "gender" tidak bisa dipisahkan dari budaya bahkan politik, karena keduanya lah yang selama ini membentuk dan mempertahankan "gender" tersebut.

Selama ini masyarakat sering mengartikan gender sama dengan jenis kelamin. Jenis kelamin yang dimiliki seseorang saat lahir dikatakan sebagai hal yang menentukan gendernya. Padahal jika kita memahami kembali, gender sebagai produk budaya tidak selalu dibentuk secara koheren karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu "jenis kelamin" yang terbentuk secara biologis tidak bisa begitu saja dikatakan sebagai penyebab munculnya "gender" dan "gender" itu sendiri tidak seperti jenis kelamin. Karena itulah kemudian Butler (1999:10) menyimpulkan:

*If gender is the cultural meanings that the sexed body assumes, then a gender cannot be said to follow from a sex in any one way.*

Jika gender adalah pengertian budaya yang diambil oleh suatu tubuh dengan jenis kelamin, maka gender tidak bisa dikatakan mengikuti jenis kelamin dengan cara apapun.

Karena itulah gender sebenarnya merupakan hal yang kompleks dan tidak bisa disamakan dengan jenis kelamin yang bisa begitu saja dibedakan berdasarkan bentuk biologisnya. Jika jenis kelamin tidak bisa menjadi acuan atas gender seseorang, maka bisa disimpulkan bahwa berbeda dengan jenis kelamin yang

dibedakan atas dua yaitu laki-laki dan perempuan, gender tidak juga harus dibedakan menjadi dua.

Jika awalnya gender dan jenis kelamin dikatakan berbeda, hal ini kembali dipertanyakan begitu adanya peristiwa transgender. Seorang dengan jenis kelamin laki-laki yang merasa dirinya sebagai “wanita”, diharapkan untuk memberi performa seperti halnya seseorang dengan gender wanita. Tidak hanya dari perilaku, namun masyarakat akan mulai berekspektasi bahwa dia akan berpenampilan seperti wanita, bahkan seperti memiliki jenis kelamin perempuan. Melihat itu, dapat dimengerti kenapa Butler mengatakan bahwa gender, jenis kelamin, dan bahkan orientasi seksual seseorang merupakan sesuatu yang performatif.

Sejak dahulu, manusia sebagai makhluk sosial hidup dalam kelompok yang kemudian disebut masyarakat. Demi hidup rukun, setiap masyarakat menetapkan hukum yang berlaku dalam lingkungan mereka. Setiap anggota masyarakat ikut serta dalam penentuan aturan dan dengan kuasa mereka menetapkan mana yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Kuasa masyarakat untuk menentukan kebenaran ini berkaitan dengan Teori Kuasa Wacana Foucault, di mana dalam kasus ini masyarakat sebagai pemegang kuasa dapat menentukan bagaimana seseorang saat lahir akan langsung diharapkan menjadi manusia dengan gender yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Mulai dari cara bersikap, berbicara, pembagian peran, perilaku, kegemaran, hingga seksualitas mereka. Masyarakat memperhatikan setiap performa yang dilakukan seseorang dan seperti yang Butler (1999:178) katakan:

*....we regularly punish those who fail to do their gender right.*

Kita (masyarakat) akan menghukum seseorang yang gagal bersikap seperti gendernya.

Contohnya ketika seorang dengan jenis kelamin perempuan dan gender wanita bersikap enerjik dan kasar, sementara masyarakat tempatnya tinggal beranggapan bahwa seharusnya dia bersikap lembut dan halus, maka orang tersebut akan langsung dikatakan menyalahi gender dan jenis kelaminnya, lalu muncullah wacana bahwa seorang perempuan harus feminin. Seperti yang dikatakan De

Beauvoir dalam Butler (1999:12) bahwa seseorang bukan terlahir perempuan, namun menjadi perempuan.

Maskulin dan feminin tidak hanya terbatas pada bagaimana cara bersikap, namun kegemaran bahkan pekerjaan juga tidak luput dari keduanya. Ada pekerjaan yang dikatakan sebagai pekerjaan maskulin karena didominasi oleh laki-laki, pun pekerjaan feminin yang pekerjaannya didominasi perempuan. Liben, Bigler & Krogh (2001:348) dalam artikelnya mengatakan:

*... it may be that occupations inherently higher in status are more likely to be filled by men, perhaps because men seek higher status jobs than do women, and/or because women are denied access to higher status jobs.*

...perbedaan bagaimana suatu pekerjaan dapat dikatakan maskulin mungkin karena pekerjaan dengan jabatan tinggi akan didominasi laki-laki karena laki-laki yang selalu mencari pekerjaan berjabatan tinggi dibanding perempuan, dan/atau karena perempuan tidak bisa mengakses pendidikan yang sepadan dengan posisi pekerjaan tersebut sehingga tidak bisa ikut bersaing.

Kemudian hal yang sama terjadi pada pengelompokan sebuah kegemaran apakah kegemaran tersebut maskulin atau feminin. Hobi atau kegemaran seperti merajut, menggambar, merawat bunga cenderung dikatakan sebagai hobi yang feminin. Sementara hobi olahraga seperti berlari, tenis, dan sepak bola akan dikatakan sebagai hobi yang maskulin. Padahal jika ditelusuri kembali, pengelompokan hobi berdasarkan gender tersebut juga merupakan budaya yang tumbuh dalam masyarakat.

### **2.3 Pandangan Masyarakat Jepang Tentang Gender dan Seksualitas**

Pandangan masyarakat Jepang terkait gender dan seksualitas di era *post-modern* beragam. Namun jika disimpulkan, semua berpusat pada usaha mengubah masyarakat yang erat dengan sistem patriarki menjadi masyarakat dengan kesetaraan gender. Mengutip pernyataan dari partai berkuasa pada pemerintahan Jepang tahun 2016, Partai Liberal Demokratis, dalam artikel milik Kawasaka Kazuyoshi yang berjudul “Contradictory Discourses on Sexual Normality and National Identity in Japanese Modernity” , Kawasaka (2017:18) menyimpulkan

*In their narrative, Japan has been tolerant for gender and sexual diverse expressions since the Middle Ages but because of the Westernisation since the Meiji Restoration, homosexuality has become a taboo and temporarily illegal; yet, Japan still has been open for gender and sexual diversity as Japanese people have continued to appreciate traditional transgender theatrical expressions and literature.*

Dalam narasinya, Partai Liberal Demokratis menyatakan bahwa Jepang sudah bersikap toleran terhadap keberagaman ekspresi seksual sejak abad pertengahan, tetapi akibat westernisasi pada era Restorasi Meiji, homoseksualitas menjadi hal yang tabu dan illegal; meski begitu Jepang masih terbuka pada berbagai keberagaman gender dan seksualitas seperti halnya masyarakat Jepang masih mengapresiasi ekspresi transgender pada seni teater tradisional dan pada karya literatur.

Mengenai westernisasi pada era Restorasi Meiji, dalam artikelnya Kawasaka (2017:15) menyatakan bahwa:

*...the gender-inverted images of homosexuals are regarded as the product of modernisation/Westernisation and are even sometimes interpreted as a symptom of the coming-future (the future), whereas the masculine representation of the samurai who is sexually self-controlled, therefore corresponding to modern heteronormativity, is regarded as a model of Japanese masculinity that has endured from the past up to the present.*

...citra homoseksual yang berkesan memiliki gender terbalik dianggap sebagai produk modernisasi / Westernisasi dan bahkan kadang-kadang ditafsirkan sebagai tanda-tanda keadaan masa depan, sedangkan samurai yang mengendalikan hasrat seksual mereka menjadi representasi maskulin yang patut dicontoh oleh masyarakat Jepang dan sejalan dengan heteronormativitas, sehingga dianggap sebagai model maskulinitas Jepang yang telah bertahan dari dulu hingga sekarang.

Masyarakat Jepang menganggap budaya patriarki sebagai budaya yang sudah ada sejak Jepang dahulu. Tetapi Susy Ong (2019:194) menyatakan bahwa pada pertengahan abad ke-19 sebelum terjadinya Restorasi Meiji, tidak ada pembagian peran yang jelas berdasarkan gender. Pembagian peran berdasar gender sebagai peran yang maskulin dan yang feminin bisa dikatakan dimulai sejak Restorasi Meiji dan berjalan hingga saat ini. Laki-laki yang dianggap maskulin berperan mencari nafkah dan pemimpin kepala keluarga, sementara perempuan yang feminin menjadi peran yang mendukung laki-laki. Hal ini diperkuat dari data wawancara yang dilakukan oleh Belarmino dan Roberts (2019:277) yang dimuat dalam artikel mereka.

*Two more interviewees stated that women play a more subordinate role towards men, meaning they were expected to care for the needs of the men in their lives and that it is expected for “women to try to support the men.” ...[Japanese women] are supposed to support the men rather than being women.*

Dua narasumber lain menyatakan bahwa perempuan memainkan peran yang lebih tunduk kepada laki-laki dan diharapkan untuk mengurus keperluan serta mendukung kehidupan laki-laki, sehingga menjadi “(Perempuan Jepang) seharusnya mendukung laki-laki dibandingkan menjadi perempuan sendiri.”

Belarmino dan Roberts menjelaskan bahwa dalam *interview* mereka, ada dua narasumber yang menyatakan bahwa dalam masyarakat Jepang, perempuan memainkan peran yang lebih patuh kepada laki-laki dan berarti perempuan diharapkan untuk mengurus kebutuhan hidup laki-laki seperti bagaimana dikatakan bahwa “perempuan harus mencoba mendukung laki-laki“. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa “Perempuan Jepang” diharuskan menjadi pendukung (kehidupan) laki-laki daripada menjadi perempuan sendiri. Meski begitu, mulai terlihat bagaimana masyarakat Jepang mengharapkan kesetaraan gender dengan mulai adanya studi terkait gender yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, dan membahas bahwa penyintas dari dua peristiwa tersebut tidak hanya perempuan namun juga laki-laki.

Terkait pekerjaan, Belarmino dan Roberts (2019:282) juga mendapat pernyataan dari salah satu narasumber bahwa ketidaksetaraan gender dalam dunia kerja dapat sangat dirasakan sampai saat ini. Misalnya tentang fakta bahwa adanya kecenderungan perusahaan memilih kandidat karyawan laki-laki meski ada kandidat perempuan dengan kemampuan yang sama. Selain itu, persentase pekerja *full-time* di Jepang didominasi oleh laki-laki sementara perempuan lebih banyak ditempatkan pada pekerjaan *part-time*. Mereka juga menjelaskan bahwa karyawan perempuan lebih mudah mengambil cuti, berkebalikan dengan karyawan laki-laki yang sulit mengambil cuti. Tetapi, belakangan ini, mulai muncul gerakan yang disebut “*Ikumen*”, yaitu gerakan untuk menyerukan laki-laki untuk turut aktif berperan membesarkan anak dan untuk mengambil cuti melahirkan dan membesarkan anak bersamaan dengan istrinya. Cuti tersebut disebut dengan istilah “育児休業 / 育児休暇” (*Ikujikyuuugyou / Ikujikyuuuka*) .

Program *Ikumen* dan *Ikuji kyuuka* merupakan program Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang yang dicanangkan sejak revisi undang-undang cuti kelahiran anak dan cuti perawatan anggota keluarga, dan dilaksanakan sejak tahun awal tahun 2021. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam website Kementerian Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan Jepang.

令和元年 12 月 27 日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。この改正により、令和 3 年 1 月 1 日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。

Berdasarkan revisi undang-undang terkait cuti kelahiran anak dan cuti mengurus keluarga yang diumumkan pada 27 Desember 2019, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 pekerja yang mengasuh anak dan pengasuhan jangka panjang akan dapat mengambil cuti mengasuh anak dan cuti pengasuhan jangka panjang atau izin meninggalkan pekerjaan dalam hitungan perjam.

Selain program *Ikuji kyuuka* yang ditujukan untuk menghilangkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam karir serta membantu pasangan suami istri yang berkarir, Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang mengumumkan kebijakannya lewat konferensi pers pada 30 April 2015 terkait bagaimana menghadapi pelajar yang mengalami *Gender Identity Disorder* dengan menghimbau tenaga pengajar untuk memberikannya bantuan dan dukungan pada permasalahan yang sedang dialami murid-murid tersebut. Tenaga pengajar di seluruh instansi pendidikan dihimbau untuk mendengar keluh kesah murid-muridnya terutama jika murid tersebut masih dibingungkan dengan gender, seksualitas, atau hal lainnya. Selain dukungan moral, salah satu contoh himbauan terkait dukungan yang diberikan oleh pihak pengajar dan sekolah adalah untuk memberikan izin pada murid untuk berpakaian layaknya bagaimana mereka mengidentifikasi jenis kelamin dan gender mereka. Setelah himbauan tersebut, awalnya beberapa sekolah masih hanya mengizinkan siswi-siswinya untuk memilih *surakkusu* (celana panjang) daripada *sukaato* (rok pendek) untuk menghindari udara yang dingin. Tetapi seiring berjalannya waktu dan banyaknya dorongan dari komunitas LGBT di Jepang, beberapa sekolah mengubah keseluruhan model seragamnya dari *seerafuku* untuk perempuan dan

*gakuran* untuk laki-laki menjadi blazer *unisex* dan mempersilakan murid-muridnya memilih dasi yang mereka rasa cocok.

Melihat berbagai pandangan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jepang, bisa kita simpulkan bahwa masyarakat Jepang yang awalnya masih memegang teguh pemahaman bahwa seseorang dengan jenis kelamin perempuan harus bersikap feminin dan begitu juga seorang laki-laki harus bersikap maskulin, kini mulai bersikap toleran dan berusaha menghilangkan kesenjangan antara kedua jenis kelamin dan gender dalam masyarakat. Melalui Teori Kuasa Wacana, penulis akan menganalisis permasalahan terkait wacana gender dan seksualitas dalam komik *Seibetsu Mona Lisa No Kimi E* dengan konsep gender menurut Judith Butler dan konsep seksualitas menurut Michel Foucault. Lalu, untuk mengetahui perbandingan kondisi masyarakat dalam komik dengan masyarakat Jepang dewasa ini, penulis akan membandingkan keduanya berdasar informasi yang penulis temukan.

